



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh :

**Fariz Dzulkarnain Hasan
NIM 130810101216**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2019**



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1) dan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

Fariz Dzulkarnain Hasan
NIM 130810101216

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga pada ALLAH SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta Asan dan Henny Demiyanti, atas semua do'a, kasih sayang, pengorbanan, perhatian dan ajaran kebaikan lainnya;
2. Kedua adik saya Anisa Nurhasah dan Aura Nirmala Sari, atas do'a dan semangatnya.
3. Kepada pacar saya Kurnia Yunita Azarria atas do'a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Guru dan dosen yang telah memberikan ilmu dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

MOTTO

“Lakukan yang terbaik, sehingga aku tak akan menyalahkan diriku sendiri atas segalanya”

(Magdalena Neuner)

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(Terjemahan QS. Al-Insyirah : 6-8)

“Bukanlah seorang pemuda apabila berkata ini adalah ayahku, seorang pemuda sejati adalah yang mengatakan ini lah diriku”

(Mahfudzat)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fariz Dzulkarnain Hasan

NIM : 130810101216

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam penutupan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Agustus 2019

Yang menyatakan,

Fariz Dzulkarnain Hasan

NIM 130810101216

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA
ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI
JEMBER**

Oleh :

Fariz Dzulkarnain Hasan

NIM 130810101216

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I : Dra. Anifatul Hanim, M.Si

Dosen Pembimbing II : Fajar Wahyu Prianto, S.E.,M.E

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur

Nama Mahasiswa : Fariz Dzulkarnain Hasan

NIM : 130810101216

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi Regional

Tanggal Persetujuan : 17 Juli, 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Anifatul Hanim, M.Si
NIP. 196507301991032001

Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E.
NIP. 198103302005011003

Mengetahui

Koordinator Program Studi IESP

Dr. Herman Cahyo Diartho., SE,MP
NIP. 197207131999031001

PENGESAHAN

Judul Skripsi

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fariz Dzulkarnain Hasan
NIM : 130810101216
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Herman Cahyo D, SE, MP (.....)
NIP. 197207131999031001
2. Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes (.....)
NIP. 196411081989022001
3. Anggota : Dra. Riniati, MP (.....)
NIP. 196004301986032001

Mengetahui / Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur**

Fariz Dzulkarnain Hasan

*Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember*

ABSTRAK

Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting untuk pemerintah pusat maupun daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana alokasi Umum yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Pada tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur mencapai Rp. 304,7 Triliun, Sektor Perdagangan menjadi penyumbang terbesar bagi provinsi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel. Hasil regresi data panel menunjukkan secara simultan bahwa variabel variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur. Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan, Sedangkan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

***Effect of Regional Original Revenue and General Allocation Fund on
Economic Growth in East Java***

Fariz Dzulkarnain Hasan

*Department of Economics and Development Studies, Faculty of Economics and
Business, University of Jember*

ABSTRACT

The increase in the level of economic growth is one of the important objectives for the central and regional governments, one of the sources of regional income is Regional Original Income (PAD) and General allocation fund consisting of the results of local taxes, the results of regional retribution, the results of separated wealth management. In 2008, the East Java Gross Regional Domestic Product (GRDP) reached Rp. 304.7 Trillion, the Trade Sector is the biggest contributor to the province. The purpose of this research were to know how the influence of Regional Original Revenue and General Allocation Fund on Economic Growth in East Java. The analytical method used is the panel data regression model. The results of panel data regression show simultaneously that the independent variable variables Regional Original Revenue and General Allocation Funds have a significant effect on the dependent variable of Economic Growth in East Java. The results of partial test analysis show that PAD has a significant influence, while the General Allocation Fund has an insignificant influence on the level of Economic Growth in East Java Province.

*Keywords: Economic Growth, Regional Original Revenue, General Allocation Fund,
Gross Regional Domestic Product (GRDP).*

RINGKASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur; Fariz Dzukarnain Hasan ; 130810101216; halaman ; Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting untuk pemerintah pusat maupun daerah. Desentralisasi merupakan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan akurat terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik yang terdapat pada masing-masing daerah. Selain sebagai tujuan pemerintah, pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator pencapaian pembangunan nasional.

Desentralisasi akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan daerah dan rencana keuangan sendiri, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Menurut Zuwesty eka putri (2015), Otonomi daerah berdasarkan UU NO. 22 Tahun 1999 lebih bernuansa desentralistik, dimana daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang diwakilkan kepada gubernur. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa desentralisasi dan dekonsentrasi.

Menurut UU NO. 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang kepada daerah dalam mengatur sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih untuk mengatur rumah tangganya. Keputusan menerapkan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah

“money follows functions”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik di daerah, dengan adanya dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Zuwesty eka putri: 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut daerah didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber penerimaan daerah lainnya antara lain dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Dana alokasi umum adalah penerimaan yang berasal dari pendanaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wujud dari desentralisasi fiskal. Dana-dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah.

Kemampuan masing-masing daerah untuk menyediakan pendanaan bergantung pada kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi yang menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan daerah Raisya Yunisa (2015).

Menurut Alexiou (2009) belanja modal pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi merupakan parameter atau tolak ukur dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Raisya Yunisa: 2015).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan

investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja daerah yang signifikan. Hal ini disebabkan adanya pendapatan asli daerah tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya.



PRAKATA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis.
2. Ibu Dra. Anifatul Hanim, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing penulis secara akademis dengan tulus dan ikhlas. Segala dukungan berupa motivasi, inspirasi, arahan dan kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak terhitung nilainya, sehingga memacu penulis untuk menyelesaikan penulisan dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Fajar Wahyu Prianto, S.E., M.E. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing penulis secara akademis dengan tulus dan ikhlas. Segala dukungan berupa motivasi, inspirasi, arahan dan kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak terhitung nilainya, sehingga memacu penulis untuk menyelesaikan penulisan dengan sebaik-baiknya.
4. Ibu Riniati selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, yang telah bersedia memberikan motivasi, dukungan, bimbingan akademik dan bimbingan karakter kepada penulis.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Orang tua tercinta, Ibunda Henny Demiyanti dan Ayahanda Asan yang menjadi orang tua sekaligus menjadi guru, sahabat, tempat berbagi cerita hingga menjadi teman diskusi tentang semua hal, yang telah bekerja keras membesarkan penulis dengan kasih sayang, ketulusan, kesabaran serta telah mendidik penulis hingga mampu sampai ke jenjang pendidikan tinggi sekarang ini. Terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, perhatian, doa, nasihat, saran, masukan berupa pemikiran-pemikiran inspiratif, serta pengorbanan berupa fisik, tenaga, pikiran, waktu maupun materil yang tidak ternilai dan selamanya tidak akan pernah mampu dibalas oleh penulis.

Semoga ini menjadi asbab yang mampu membawa penulis untuk mengangkat derajat kedua orang tua dan keluarga besar agar mencapai masa depan yang lebih baik dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat.

8. Adik tersayang Anisa Nurhasanah dan Aura Nirmala Sari yang selalu membantu, memberi dukungan, dan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pacar saya Kurnia Yunita Azarria atas do'a dan dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat dan teman-teman seperjuangan skripsi, Ferly, Rohman, Opik dan keluarga besar IESP 2013 serta teman-teman Konsentrasi Ekonomi Regional. Terima kasih atas semua dukungan dan sarannya selama ini.
11. Keluarga KKN desa Ramban Kulon, Bapak Bunamin sekeluarga, Pak Fery sekeluarga, Mba Intan, Mba Ifa, Mba Betary, Mas Aldy, Taqin, Mirza, Wildi, Silvi dan Leli, terimakasih atas kebersamaan, doa, semangat dan dukungan serta kenangan pengabdian di desa dalam waktu yang tidak sebentar.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Akhir kata, dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan oleh segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Namun penulis berusaha untuk mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar dapat memiliki manfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan skripsi ini.

Jember, 26 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN SAMPUL | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTO | iv |
| HALAMAN PERNYATAAN | v |
| HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI | vi |
| HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI | vii |
| HALAMAN PENGESAHAN | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| RINGKASAN | xi |
| PRAKATA | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR TABEL | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xx |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 6 |
| 2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi | 8 |
| 2.1.1 Teori Cobb-Douglas..... | 8 |
| 2.1.2 Teori Kausasi Kumulatif | 9 |
| 2.1.3 Teori Harrod-Domar | 10 |

| | |
|--|----|
| 2.1.4 Teori Solow-Swan | 12 |
| 2.2 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi... | 14 |
| 2.3 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah..... | 17 |
| 2.3.1 Pendapatan Asli Daerah..... | 17 |
| 2.3.2 Dana Alokasi Umum..... | 19 |
| 2.3.3 Dana Alokasi Khusus..... | 21 |
| 2.3.4 Dana Bagi Hasil | 24 |
| 2.4 Penelitian Terdahulu | 19 |
| 2.5 Kerangka Konseptual | 28 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN..... | 32 |
| 3.1 Rancangan Penelitian..... | 32 |
| 3.1.1 Jenis Penelitian | 32 |
| 3.1.2 Jenis dan Sumber Data..... | 32 |
| 3.1.3 Waktu dan Tempat Penelitian..... | 32 |
| 3.2 Metode Analisi Data | 32 |
| 3.2.1 Analisis Regresi Data Panel..... | 32 |
| 3.3 Pemilihan Model Data Panel..... | 36 |
| 3.3.1 Uji Chow..... | 36 |
| 3.3.2 Uji Hausman | 37 |
| 3.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)..... | 38 |
| 3.4 Uji Statistik | 38 |
| 3.4.1 Uji F | 38 |
| 3.4.2 Uji T | 40 |
| 3.4.3 Koefisien Determinan (R ²) | 41 |
| 3.5 Uji Asumsi Klasik | 41 |
| 3.5.1 Uji Normalitas..... | 41 |
| 3.5.2 Uji Multikolinearitas..... | 42 |
| 3.5.3 Uji Autokorelasi..... | 42 |

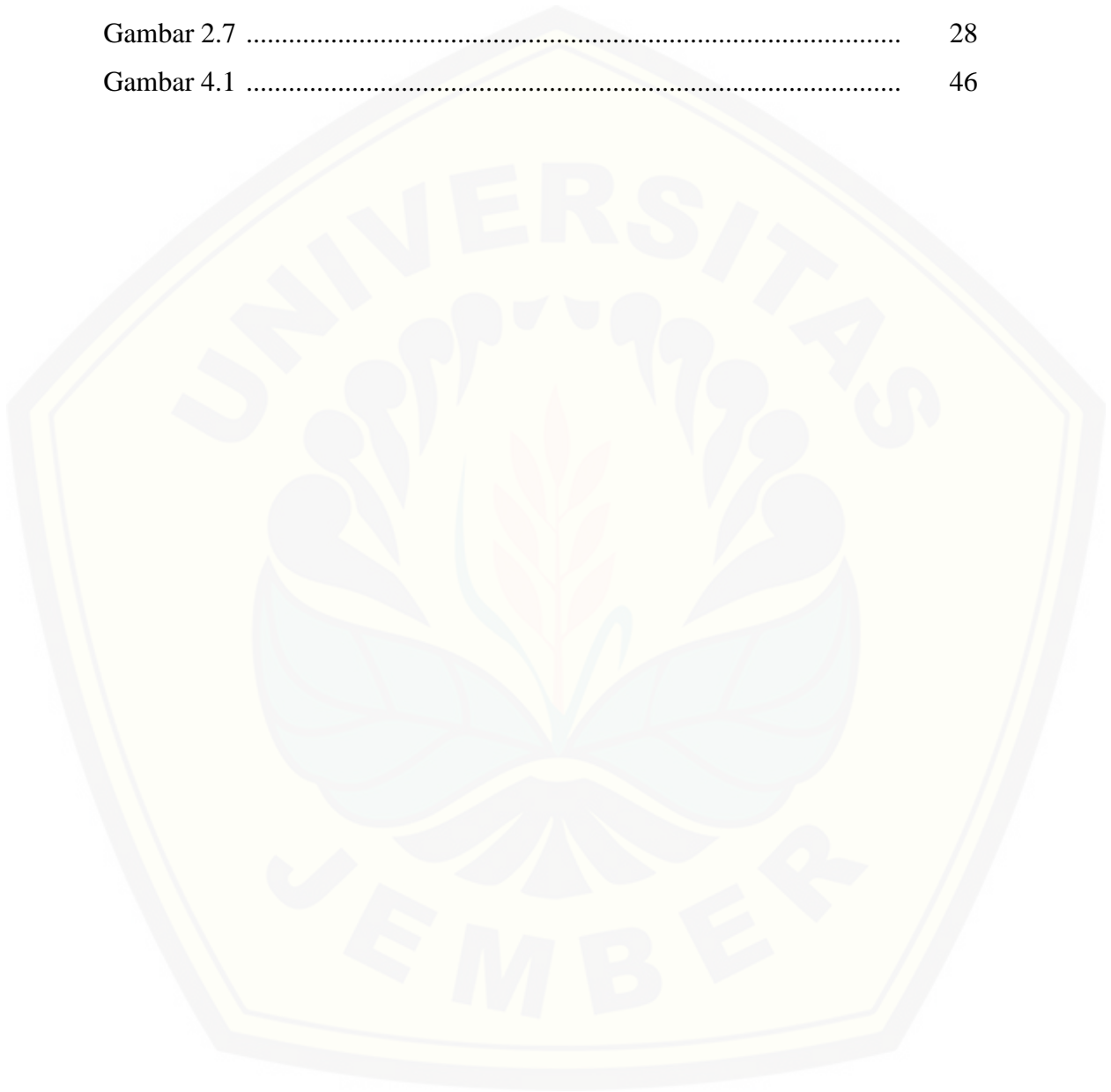
| | |
|---|-----------|
| 3.5.4 Uji Heteroskedastisitas | 43 |
| 3.6 Definisi Operasional Variabel..... | 44 |
| BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 45 |
| 4.1 Gambaran Umum | 46 |
| 4.1.1 Kondisi Geografis Jawa Timur | 46 |
| 4.1.2 Gambaran Perkembangan Penduduk | 46 |
| 4.2 Analisis Deskriptif..... | 48 |
| 4.2.1 Hasil Chow Test dan Hasuman Test..... | 49 |
| 4.3 Analisis Data Hasil Penelitian..... | 50 |
| 4.3.1 Analisis Regresi Data Panel..... | 50 |
| 4.4 Uji Statistik | 52 |
| 4.4.1 Uji F | 52 |
| 4.4.2 Uji T | 53 |
| 4.4.3 Uji R^2 | 54 |
| 4.5 Uji Asumsi Klasik | 55 |
| 4.5.1 Uji Normalitas..... | 56 |
| 4.5.2 Uji Multikolinearitas | 56 |
| 4.5.3 Uji Autokorelasi..... | 57 |
| 4.5.4 Uji Heteroskedastisitas | 58 |
| 4.6 Pembahasan..... | 60 |
| 4.6.1 Pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur..... | 60 |
| 4.6.2 Pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur..... | 61 |
| BAB 5. PENUTUP..... | 63 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 63 |
| 5.2 Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN..... | 66 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur..... | 3 |
| Tabel 2.2 Fungsi Produksi Harrod-Domar..... | 11 |
| Tabel 2.3 Fungsi Produksi Neo Klasik | 13 |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur | 46 |
| Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif..... | 48 |
| Tabel 4.6 Hasil Uji Chow..... | 49 |
| Tabel 4.7 Hasil Uji Hausman..... | 50 |
| Tabel 4.8 Hasil Analisis Data Panel Menggunakan Pendekatan Fixed Effect Model | 51 |
| Tabel 4.9 Hasil Uji F..... | 53 |
| Tabel 4.10 Hasil Uji T..... | 54 |
| Tabel 4.11 Hasil Uji R^2 | 55 |
| Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas..... | 57 |
| Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi | 58 |
| Tabel 4.14 hasil Uji Heterokedastsitas..... | 59 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|------------------|----------------|
| Gambar 2.7 | 28 |
| Gambar 4.1 | 46 |



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenaikan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan penting untuk pemerintah pusat maupun daerah. Desentralisasi merupakan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan akurat terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik yang terdapat pada masing-masing daerah. Selain sebagai tujuan pemerintah, pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator pencapaian pembangunan nasional.

Desentralisasi akan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan daerah dan rencana keuangan sendiri, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Menurut Zuwesty eka putri (2015), Otonomi daerah berdasarkan UU NO. 22 Tahun 1999 lebih bernuansa desentralistik, dimana daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang diwakilkan kepada gubernur. Dengan adanya otonomi daerah memunculkan dimensi baru berupa desentralisasi dan dekonsentrasi.

Menurut UU NO. 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desentralisasi fiskal merupakan pemberian wewenang kepada daerah dalam mengatur sumber-sumber keuangan sendiri, sehingga daerah mempunyai kesempatan yang lebih untuk mengatur rumah tangganya. Keputusan menerapkan desentralisasi fiskal menuntut adanya peningkatan ekonomi di daerah karena prinsip dasar dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah “money follows functions”, yaitu fungsi pokok pelayanan publik di daerah, dengan

adanya dukungan pembiayaan pusat melalui penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah (Zuwesty eka putri: 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut daerah didasarkan pada peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber penerimaan daerah lainnya antara lain dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK). Dana alokasi umum adalah penerimaan yang berasal dari pendanaan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai wujud dari desentralisasi fiskal. Dana-dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan kepemilikan sumber daya alam, perbedaan jumlah penduduk, dan tenaga kerja yang berbeda antar daerah.

Kemampuan masing-masing daerah untuk menyediakan pendanaan bergantung pada kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi ekonomi yang menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan mengakibatkan tidak meratanya pertumbuhan daerah Raisya Yunisa (2015).

Menurut Alexiou (2009) belanja modal pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Pertumbuhan Ekonomi merupakan parameter atau tolak ukur dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Raisya Yunisa: 2015).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan

investasi pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja daerah yang signifikan. Hal ini disebabkan adanya pendapatan asli daerah tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya. Pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur tahun 2013-2015 tertera pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur Tahun 2013-2015

| Subjek | Tahun | | |
|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Pajak Daerah | 7.863.719.6335 | 9.285.000 | 12.591.000 |
| Retribusi Daerah | 1.264.057.555 | 104.887.319.435 | 136.337.487.000 |
| Bagian Laba BUMD | 328.891.596.516 | 339.967.745.080 | 351.344.506.000 |
| Pendapatan lain-lain | 120.488.498.196 | 137.370.973.732 | 169.245.728.200 |
| TOTAL PAD | 9.523.901.967.476 | 11.103.564.801.835 | 14.771.139.275 |

(Sumber: BPS Jawa Timur, 2013-2015)

Berdasarkan tabel 1.1 tentang perkembangan realisasi penerimaan daerah propinsi Jawa Timur pada tahun 2013 sampai 2015 menunjukkan bahwa sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan pendapatan lain-lain hasil kekayaan daerah semakin meningkat tiap tahunnya.

Provinsi Jawa Timur terletak di ujung timur Pulau Jawa dan memiliki lebih dari 60 pulau dimana Pulau Madura merupakan terbesar, secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Jawa Timur daratan dan pulau Madura. Dimana luas wilayah Jawa Timur daratan hampir mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Pulau Madura hanya sekitar 10 persen.

Secara administratif, Provinsi Jawa Timur terbagi atas 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Kabupaten Malang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah terluas dengan luas sebesar 3.519 Km²

(7,4%), sementara kota Mojokerto memiliki luas wilayah terkecil dengan luas hanya 16 Km² (0,03%) dari luas provinsi.

Pada tahun 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur mencapai Rp. 304,7 Triliun. Sektor Perdagangan menjadi penyumbang terbesar bagi provinsi ini dengan Rp. 95,8 Triliun (31%), diikuti oleh sektor industri Pengolahan dengan Rp 79,5 Triliun (26%) kemudian Pertanian dengan nilai sebesar Rp. 49,4 Triliun (16%). Pada sektor perdagangan persentase sumbangan sub sektor perdagangan besar dan eceran, hotel dan restoran masing-masing sebesar 81,4%, 2,6% dan 16%. Untuk industri pengolahan dikuasai sub sektor industri non migas dengan 100%. Untuk pertanian persentase terbesar berasal dari sub sektor tanaman bahan makanan dengan 55%, lalu tanaman perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan masing-masing sebesar 17%, 16%, 10% dan 2%.

Pada sektor pertanian komoditi yang diunggulkan pada provinsi ini adalah sub sektor tanaman perkebunan, dengan komoditi unggulan tebu. Sedangkan komoditi penunjang pada sub sektor tanaman perkebunan, dengan komoditi kelapa, kopi, jambu mete. Sub sektor tanaman bahan makanan berupa komoditi jagung, kedelai, kacang tanah dan ubi kayu. Sub sektor kehutanan dengan komoditi rotan. Sub sektor perikanan dengan komoditi rumput laut dan budidaya ikan laut. Sub sektor peternakan dengan komoditi sapi. Sedangkan bidang pariwisata menjadi unggulan di sektor jasa.

Untuk mendukung roda perekonomian dan kegiatan investasi, di provinsi ini terdapat berbagai sarana dan prasarana, antara lain Bandara Juanda yang terdapat di Kota Surabaya, Bandara Abdurrachman Saleh berada di Kabupaten Malang, pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya, dan Pelabuhan Panarukan di Kabupaten Situbondo.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi :

1. Pengembangan Ilmu Ekonomi : Diharapkan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan referensi mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember.
2. Peneliti : Memberikan informasi dan kontribusi yang berguna untuk pengembangan penelitian sektor publik terutama dalam hal Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
3. Peneliti Lain : Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan,

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara (Mirza, 2012). Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, maka semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi dan hal itu nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pada hakikatnya pembangunan mencerminkan perubahan sistem sosial secara total sesuai dengan berbagai kebutuhan dasar, serta upaya menumbuhkan aspirasi individu dan kelompok-kelompok sosial dalam sistem tersebut. Pembangunan seharusnya merupakan upaya untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin. (Todaro dan Smith, 2009)

Pembangunan ekonomi pada suatu daerah adalah proses kerja antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Proses pembangunan yang terjadi antara kota dan desa yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan

juga sistem penetapan upah yang berlaku di sistem modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap urbanisasi yang ada (Kuncoro, 1997).

Jhingan dalam Septian (2015) mengemukakan berbagai syarat-syarat pembangunan ekonomi yaitu:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumbu pada kemampuan perkenomian dalam negeri atau daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakat.
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar, ketidak sempurnaan pasar menyebabkan *inmobilitas* faktor dan menghambat ekspansi sectoral dan pembangunan.
3. Perubahan structural, artinya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industry yang ditandai dengan meluasnya sektor sekunder dan tersier serta menyempitnya sektor primer.
4. Pembentukan modal merupakan faktor yang paling penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi dan diartikan sebagai kunci utama untuk menuju pembangunan ekonomi.
5. Kriteria investasi yang tepat memiliki tujuan untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat tetapi tetap mempertimbangkan dinamika perkenomian.
6. Persyaratan sosio-budaya serta organisasinya harus dimodifikasi sehingga selaras dengan pembangunan.
7. Administrasi sebagai alat perlengkapan administrasi untuk perencanaan ekonomi pembangunan.

Todaro dan Smith (2011) menyatakan pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan berikut :

2. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tingkat, kesehatan dan perlindungan.
3. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih

baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemiskinan. Secara keseluruhan, hal-hal ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan yang bersifat materi (*material well-being*) tetapi juga menumbuhkan harga diri individu dan bangsa.

4. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari ketergantungan terhadap orang atau negara-negara lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Menurut Rostow dalam Arsyad (1988) pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multi-demensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja.

2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1 Teori *Cobb Douglas*

Pertumbuhan ekonomi menurut Neo Klasik dalam Arsyad (1988:207) pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai dimana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi.

Teori pertumbuhan Neo Klasik ini mempunyai banyak variasi, tetapi pada umumnya mereka didasarkan kepada fungsi produksi yang telah dikembangkan oleh *Charles Cobb* dan *Paul Douglas* yang sekarang dikenal dengan sebutan *fungsi produksi Cobb-Douglas*.

Fungsi tersebut bisa dituliskan dengan cara berikut :

$$Q_t = T_t K_t^\alpha L_t^\beta$$

Dimana :

Q_t = tingkat produksi pada tahun t

T_t = tingkat teknologi pada tahun t

K_t = jumlah stok barang modal pada tahun t

L_t = jumlah tenaga kerja pada tahun t

α = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal

β = pertambahan output yang diciptakan oleh pertambahan satu unit tenaga kerja

Nilai T , α dan β bisa diestimasi secara empiris. Tetapi pada umumnya nilai α dan β ditentukan saja besarnya dengan menganggap bahwa $\alpha + \beta = 1$, yang berarti bahwa α dan β nilainya adalah sama dengan produksi batas dari masing-masing faktor produksi tersebut. Dengan kata lain, nilai α dan β ditentukan dengan melihat peranan tenaga kerja dan modal dalam menciptakan output.

2.1.2 Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk menunjukkan konsep dasar dari teori kausasi kumulatif (*cumulative causation*) ini. Kekuatan-kekuatan pasar cenderung memperparah kesenjangan antar daerah maju dan terbelakang. Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya (Arsyad, 1999). Teori ini dijelaskan lebih lanjut oleh Rahardjo Adisasmita (2005) bahwa untuk menanggulangi masalah ketimpangan antar daerah dalam pembangunan dihadapi proses lingkaran tidak berujung pangkal (*vicious circle*). Daerah yang terbelakang karena masyarakatnya miskin, mereka menjadi miskin karena kapasitas sumber daya manusianya lemah serta ketersediaan sarana pembangunan yang terbatas. Ekspansi di suatu wilayah mempunyai pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) terhadap wilayah yang lain. Adanya migrasi,

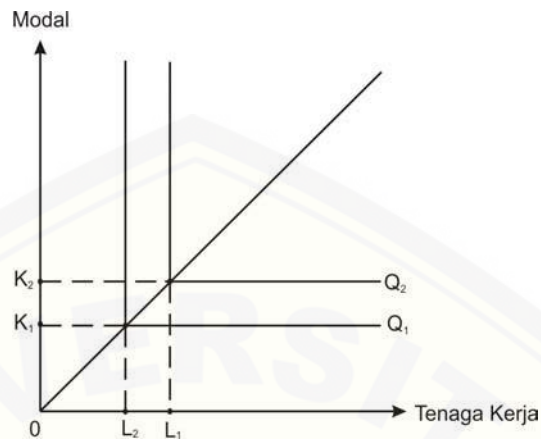
perpindahan modal, dan perdagangan merupakan sarana bagi proses kumulatif yang cenderung menguntungkan daerah yang sedang mengalami ekspansi yang cepat dan merugikan daerah lainnya. Perpindahan modal cenderung mengakibatkan bertambahnya ketidakmerataan. Sedangkan perdagangan juga bergerak dengan kecenderungan yang menguntungkan daerah yang lebih kaya atau lebih maju dan merugikan daerah-daerah lainnya.

2.1.3 Teori Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap. (Arsyad, 1999: 64-69).

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi yaitu :

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*capital-output ratio = COR*) dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio = ICOR*) (Arsyad, 1999: 58).



Gambar 2.2 Fungsi Produksi Harrod-Domar

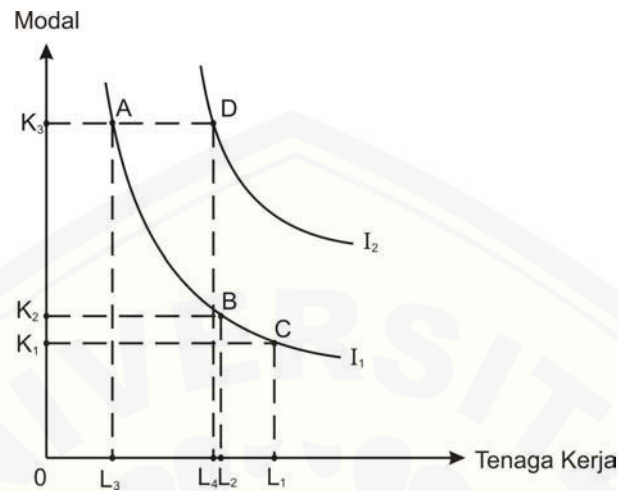
Dalam teori Harrod-Domar ini, fungsi produksinya berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu tingkat output tertentu (modal dan tenaga kerja yang tidak substitutif). Untuk menghasilkan output sebesar Q_1 diperlukan modal K_1 dan tenaga kerja L_1 , dan apabila kombinasi itu berubah maka tingkat output berubah. Untuk output sebesar Q_2 , misalnya hanya dapat diciptakan jika stok modal sebesar K_2 .

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk menggantikan barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut.

Logika ekonomi yang terkandung dalam persamaan (3.7) diatas sangatlah sederhana. Agar bisa tumbuh dengan pesat, setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GDP-nya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat. Akan tetapi, tingkat pertumbuhan aktual yang dapat dijangkau pada setiap tingkat tabungan dan investasi–banyaknya tambahan output yang didapat dari tambahan satu unit investasi–dapat diukur dengan kebalikan rasio modal-output, k , karena rasio yang sebaliknya ini, yakni $1/k$, adalah rasio output-modal atau rasio output-investasi. Selanjutnya, dengan mengalikan tingkat investasi baru $s = I/Y$, dengan tingkat produktivitasnya, $1/k$, maka akan didapat tingkat pertumbuhan dimana pendapatan nasional atau GDP akan naik (Todaro, 2006: 129 – 130).

2.1.4 Teori Solow – Swan

Model pertumbuhan neo-klasik Solow (*Solow neoclassical growth model*) merupakan pilar yang sangat memberi kontribusi terhadap teori pertumbuhan neoklasik sehingga penggagasnya, Robert Solow, dianugerahi hadiah Nobel bidang ekonomi. Pada intinya, model ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod – Domar dengan menambahkan faktor kedua, yakni tenaga kerja, serta memperkenalkan variabel independen ketiga, yakni teknologi, ke dalam persamaan pertumbuhan (*growth equation*). Sifat teori pertumbuhan neo-klasik bisa digambarkan seperti pada gambar 3. Fungsi produksinya ditunjukkan oleh I_2 , I_2 , dan seterusnya. Dalam fungsi produksi yang berbentuk demikian, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan menggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja. Misalnya untuk menciptakan output sebesar I_1 , kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan antara lain (a) K_3 dengan L_3 , (b) K_2 dengan L_2 , dan (c) K_1 dengan L_1 . Dengan demikian, walaupun jumlah modal berubah tetapi terdapat kemungkinan bahwa tingkat output tidak mengalami perubahan.



Gambar 2.3 Fungsi Produksi Neo-Klasik

Disamping itu, jumlah output dapat mengalami perubahan walaupun jumlah modal tetap. Misalnya walaupun jumlah modal tetap sebesar K_3 , jumlah output dapat diperbesar menjadi I_2 , jika tenaga kerja digunakan ditambah dari L_3 menjadi L_4 (Arsyad, 2004: 62 – 63). Namun, berbeda dari model Harrod – Domar yang mengasumsikan skala hasil tetap (*constant return to scale*) dengan koefisien baku, model pertumbuhan neoklasik solow berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang (*diminishing returns*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah ; jika keduanya dianalisis secara bersamaan atau sekaligus, Solow juga memakai asumsi skala hasil tetap tersebut. Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan tinggi-rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Solow maupun para teoritis lainnya diasumsikan bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi oleh faktor- faktor lain.

Dalam bentuknya yang lebih formal, model pertumbuhan neoklasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar, yakni :

$$Y = K^{\alpha} (AL)^{1-\alpha} ,$$

Di mana Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja, dan A adalah produktivitas tenaga kerja, yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Karena tingkat kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen (katakanlah 2 persen per tahun), model neoklasik Solow terkadang juga disebut sebagai model pertumbuhan "eksogen", berlawanan dengan pendekatan pertumbuhan endogen.

Adapun simbol α melambangkan elastisitas output terhadap modal (atau persentase kenaikan GDP yang bersumber dari 1 persen penambahan modal fisik dan modal manusia). Hal itu biasanya dihitung secara statistik sebagai pangsa modal dalam perhitungan pendapatan nasional suatu negara. Karena α diasumsikan kurang dari 1 dan modal swasta diasumsikan dibayar berdasarkan produk marginalnya sehingga tidak ada ekonomi eksternal, maka formulasi teori pertumbuhan neoklasik ini memunculkan skala hasil modal dan tenaga kerja yang terus berkurang (*diminishing returns*).

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi :

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yakni faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak lain adalah faktor produksi merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Turun naiknya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi. Menurut Sukirno (2011:332) Ada lima faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Alam faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya alam atau tanah. Tanah sebagaimana digunakan dalam pertumbuhan ilmu ekonomi mencakup sumber daya alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Tersedianya sumber daya alam secara melimpah merupakan hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Suatu daerah yang kekurangan sumber alam tidak akan membangun dengan cepat.
- b. Organisasi merupakan bagian penting dari proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh, dan membantu meningkatkan produktifitas. Dalam ekonomi modern para wiraswastawan tampil sebagai organisator dan pengambil resiko dalam ketidakpastian. Wiraswastawan bukanlah manusia dengan kemampuan biasa. Ia memiliki kemampuan khusus untuk bekerja dibandingkan orang lain. Menurut Schumpeter, seorang wiraswasrawan tidak perlu seorang kapitalis. Fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).
- c. Akumulasi Modal adalah persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat di reproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini sering disebut sebagai akumulasi modal atau pembentukan modal. Dalam arti ini, pembentukan modal merupakan investasi dalm bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional, dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk di daerah tersebut. Investasi dibidang barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga membuka kesempatan kerja. Pembentukan modal ini pula yang membawa kearah kemajuan teknologi yang pada akhirnya membawa kearah penghematan dalam produksi skala luas dan juga membawa kearah penggalian sumber alam, industrialisasi dan ekspansi pasar yang diperlukan bagi kemajuan ekonomi.

- d. Kemajuan Teknologi Perubahan teknologi dianggap sebagai faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau hasil teknik penelitian baru. Perubahan dalam teknologi telah menaikkan produktifitas tenaga kerja, modal dan sektor produksi.
- e. Pembagian Kerja dan Skala Produksi Pembagian kerja menimbulkan peningkatan produktifitas. Keduanya membawa perekonomian kerah ekonomi skala besar yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Perbaikan kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebih efisien dari sebelumnya.

Faktor ekonomi bersama-sama dengan faktor non ekonomi saling mempengaruhi kemajuan perekonomian. Oleh karena itu, faktor non ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik juga memiliki arti penting didalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

- a. tingkat ketergantungan pada sektor primer.
- b. peran konsumsi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
- c. pembangunan infrastruktur.
- d. kualitas sumber daya manusia.
- e. tabungan masyarakat.
- f. belanja pemerintah daerah.

2.3 Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

2.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah. Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggai dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009). Menurut Brahmantio (2002) pungutan pajak dan

retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2002):

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:
 - a. Pajak Provinsi. Pajak ini atas: (i)Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b. Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak penerangan Jalan, (vi) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.
 - c. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah.
- b. Bagian laba lembaga keuangan bank.

- c. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
- d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.3.2 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dikategorikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009)

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (Bambang Prakosa 2004).

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan Fiscal Gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan

potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

2.3.3 Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan. Kemudian, Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan. Faktor-faktor Penentu DAK nasional ditetapkan dalam APBN, sesuai dengan kemampuan APBN. yang kemudian ditindaklanjuti dengan perhitungan alokasi DAK per daerah. Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: (a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan (b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAK. Penentuan daerah penerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum sebagaimana dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan: (a) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan (b) Karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan

oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait. Sementara itu, kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

Stakeholders penentu DAK

1. Kementerian Keuangan (Direktorat Penyusunan APBN-DJA dan DJPK).
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu.
4. Kementerian Teknis.

Bidang DAK

Dalam perkembangannya, penambahan bidang-bidang yang didanai dari DAK telah mengalami penambahan. Jika alokasi DAK pada tahun 2005 digunakan untuk mendanai kegiatan di 8 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, air bersih, dan pertanian, maka pada tahun 2006 dialokasikan untuk mendanai kegiatan di 9 bidang (pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian dan lingkungan hidup). Bidang yang didanai dari DAK bertambah dua bidang lagi pada tahun 2008, yaitu bidang keluarga berencana (KB) dan bidang kehutanan sehingga menjadi 11 bidang. Pada tahun 2009 juga bertambah menjadi 13 bidang karena adanya penambahan bidang perdagangan dan bidang sarana prasarana perdesaan, dan untuk selanjutnya mengalami menjadi 14 bidang pada tahun 2010 karena adanya pemisahan Bidang DAK Air Minum dan Sanitasi menjadi DAK Air Minum dan DAK Sanitasi. Pada tahun 2011, bidang-bidang yang didanai dari DAK menjadi 19 bidang karena adanya penambahan 5 bidang baru, yaitu bidang listrik

perdesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan dan sarana dan prasarana kawasan perbatasan. Sama halnya dengan tahun 2011, dalam tahun 2012, bidangbidang yang didanai DAK berjumlah 19 (Sembilan belas). 19 Bidang yang didanai DAK tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Infrastruktur Jalan.
4. Infrastruktur irigasi.
5. Infrastruktur air minum.
6. Infrastruktur sanitasi.
7. Prasarana pemerintah.
8. Kelautan dan perikanan.
9. Pertanian.
10. Lingkungan hidup.
11. Keluarga berencana.
12. Kehutanan.
13. Perdagangan.
14. Sarana dan prasarana daerah tertinggal.
15. Listrik pedesaan.
16. Perumahan dan permukiman.
17. Transportasi pedesaan.
18. Sarana dan prasarana kawasan perbatasan.

19. Keselamatan transportasi darat.

2.3.4 Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2012 mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang, dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Prinsip DBH

- By origin
Daerah penghasil mendapat porsi yang lebih besar dari daerah lain yang berada dalam provinsi tersebut (pemerataan).
- Realisasi
Penyaluran keseluruhan DBH didasarkan pada realisasi penerimaannya. Komponen DBH DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:
 - DBH Pajak, yang meliputi:
 - DBH PPh Pasal 25 WPOPND dan PPh Pasal 21.
 - DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB).
 - DBH Cukai Hasil Tembakau.
 - DBH Sumber Daya Alam, yang meliputi:
 - DBH Pertambangan Minyak Bumi.

- DBH Pertambangan Gas Bumi.

- DBH Pertambangan Umum.

- DBH Kehutanan

- DBH Perikanan.

- DBH Pertambangan Panas Bumi.

Faktor-faktor Penentu

Perhitungan DBH diformulasikan sesuai UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU No. 39/2007 tentang Perubahan UU No. 11/1995 tentang Cukai.

Perhitungan DBH Pajak dirinci:

- DBH PPh Psl 21 & Psl 25/29 = 20% X penerimaan PPh.

- DBH PBB = penerimaan PBB

- Biaya Pungut.

- DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) = 2% X penerimaan CHT.

- DBH Sumber Daya Alam (SDA) dirinci:

- DBH Minyak dan Gas Bumi dihitung oleh Direktorat PNBP (tanpa formula).

- DBH Pertambangan Umum = 80% dari penerimaan Pertambangan Umum.

- DBH Provisi Sumber Daya Hutan = 80% X penerimaan PSDH.

- DBH Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan = 80% X penerimaan IIUPH.

- DBH Dana Reboisasi = 40% X penerimaan Dana Reboisasi.

- DBH Perikanan = 80% X penerimaan Perikanan.

- DBH Pertambangan Panas Bumi = 80% X penerimaan PBB.

Stakeholders Penentu DBH

- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.
- Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran (angka DBH Migas).
- Direktorat Jenderal Bea Cukai (angka Cukai Hasil Tembakau)
- Badan Kebijakan Fiskal (angka Penerimaan Perpajakan).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- DPD/DPR.

2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien positif sebesar 1.412177. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebesar 1.412177. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur 2012-2016.

Teori pertumbuhan Harrod-Domar membahas mengenai kegiatan ekonomi secara nasional. Teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat- syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan mantap. Pertumbuhan ekonomi yang salah satunya di dorong dengan meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah. Jumlah pendapatan asli daerah yang tinggi menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber dayanya.

Hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar -2.270006 . Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan sebesar 1% maka akan menurunkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebesar 2.270006 . Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan dana alokasi umum di Provinsi Jawa Timur 2012-2016 masih belum optimal karena pemerintah memprioritaskan alokasi dana umum dan belanja modal pada bidang-bidang yang tidak bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur 2012-2016.

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk menggantikan barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut. Dana alokasi umum digunakan untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi melalui program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dana alokasi umum mendorong penyelenggaraan otonomi daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan antar daerah.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rihfenti Ernayani (2017) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)”. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Square Regression Analysis*). Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa setiap ada perubahan skor pada variabel-variabel bebas tersebut sebesar satu satuan akan meningkatkan skor Belanja Daerah (BD) sebesar koefisien regresi kali satuan masing-masing variabel bebasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Wulandari (2013) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Square Regression Analysis*). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Kalimantan berhasil mengoptimalkan PAD yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran di daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Ratna Dewi dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2017) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Square Regression Analysis*). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar lebih mandiri secara finansial.

Penelitian yang dilakukan oleh Rihfenti Ernayani (2017) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013)”. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Square Regression Analysis*). Dalam

penelitiannya menghasilkan bahwa setiap ada perubahan skor pada variabel-variabel bebas tersebut sebesar satu satuan akan meningkatkan skor Belanja Daerah (BD) sebesar koefisien regresi kali satuan masing-masing variabel bebasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Wulandari (2013) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Square Regression Analysis*). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di pulau Kalimantan berhasil mengoptimalkan PAD yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran di daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan Ratna Dewi dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2017) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Square Regression Analysis*). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah diharapkan agar lebih mengembangkan potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah agar lebih mandiri secara finansial.

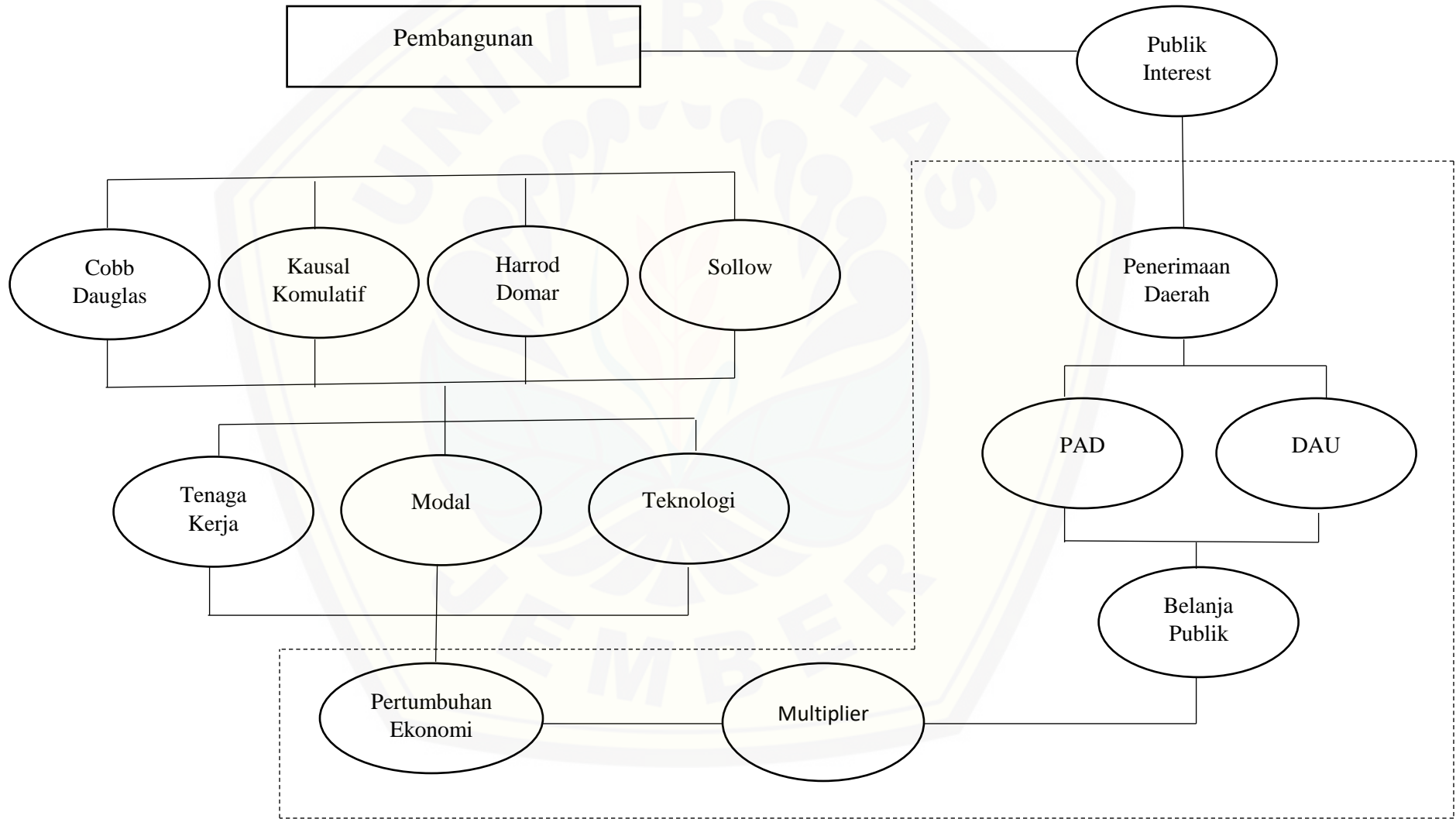
Penelitian yang dilakukan oleh Puput Purpitasari dan Kurnia (2015) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah”. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Square Regression Analysis*). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber PAD baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda (*Ordinary Least Square Regression Analysis*). Dalam

penelitiannya menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah dan DAU berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah. Hasil PAD menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Megawati Sularno (2013) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal” analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap belanja modal. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik.

2.5 Kerangka Konseptual



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis *explanatory research*. Sugiyono (2004:117) menyatakan bahwa penelitian *explanatory* merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.

3.1.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan adalah data kurun waktu (*time series*) dari tahun 2013-2015 dan *cross section* di Provinsi Jawa Timur. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

3.1.3 Waktu dan Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 38 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk kurun waktu ditetapkan pada periode penelitian tahun 2013 sampai dengan 2015.

3.2 Metode Analisis Data

3.2.1 Analisis Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menggunakan model regresi data panel serta menggunakan alat pengolahan data berupa aplikasi *eviews 9*.

Menurut Agus Widarjono (2007) metode regresi data panel mempunyai beberapa keuntungan jika dibandingkan dengan data *time series* atau *cross section*, yaitu:

1. Data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar.
2. Menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*).

Dimana analisis tersebut data berupa data tahun 2012-2016 dan data berupa data di kabupaten/kota di Jawa Timur. Menurut Ekananda (2016:2), terdapat keunggulan menggunakan data panel secara statistik maupun secara teori ekonomi, antara lain:

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik-individu digunakan dalam persamaan ekonometrika.
2. Kemampuan mengontrol heterogenitas setiap individu, pada gilirannya membuat data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks.
3. Jika efek spesifik adalah signifikan berkorelasi dengan variabel penjelas lainnya maka penggunaan data panel akan mengurangi masalah *omitted-variables* secara substansial.
4. Karena mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang, maka data panel sangat baik digunakan untuk *study of dynamic adjustment* seperti mobilitas kerja.
5. Dengan meningkatnya jumlah observasi, maka akan berimplikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, kolinearitas antar variabel yang semakin berkurang dan meningkatkan derajat kebebasan (*degrees of freedom*) dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.

6. Pengembangan lebih lanjut analisis data panel ditujukan pada model sebelumnya ditujukan pada data waktu untuk satu individu untuk menjadi analisis beberapa individu.

Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

dimana N adalah banyaknya data *cross-section*.

Sedangkan model data panel dengan persamaan model data *time-series* adalah :

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_t + \epsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

dimana T adalah banyaknya *data time-series*.

Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*, maka model dapat ditulis dengan :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it}$$

$$t = 1, 2, \dots, T ; \text{ dan } i = 1, 2, \dots, N$$

Keterangan :

T = Banyaknya waktu

N = Banyaknya observasi

N x T = Banyaknya data panel

Adapun fungsi model ekonomi dari variabel-variabel diatas, sebagai berikut:

$$Pek = f(PAD, DAU)$$

Fungsi diatas kemudian dapat ditransformasikan ke dalam model ekonometri sehingga ditulis :

$$Pek = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \epsilon_{it}$$

dimana :

Pek = Pertumbuhan Ekonomi (%)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

DAU = Dana Alokasi Umum (Rupiah)

α = Intersep

- β_{it} = Koefisien variabel
 ϵ = *Error term*
 i = 1, 2, ..., N (banyaknya sampel/observasi)
 t = 1, 2, ..., T (banyaknya waktu)

Berkaitan dengan penggunaan *panel data* dalam penelitian ini, maka digunakan tiga teknik analisis, yaitu (Ekananda, 2015;405) :

A. Metode *Pooled Least Square* (PLS) atau *Common Effect*

Model *pooled* juga sering disebut sebagai model *common* atau *homogeneity*. PLS adalah struktur model estimasi paling sederhana yang mengkombinasikan antara data *time series* dan *cross section*. Di mana estimator akan menghasilkan *intersep* α dan *slope* β sama untuk setiap individu ($\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=\dots=\alpha_i$ dan $\beta_{k1}=\beta_{k2}=\beta_{k3}=\dots=\beta_{ki}$). Dimana k adalah jenis variabel dan i adalah observasi ke-i. Persamaan yang digunakan adalah:

$$\text{Tikem}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{JP}_{i,t} + \beta_2 \text{IPM}_{i,t} + \beta_3 \text{PDRB}_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Struktur model ini mengasumsikan tidak adanya perbedaan karakteristik tingkat kemiskinan (Tikem) di Provinsi Jawa Timur selama waktu observasi.

B. Metode *Fix Effect Model* (FEM)

FEM merupakan model yang memperhatikan adanya keberagaman (heterogenitas) dari variabel independen menurut individu. Keberagaman individu diketahui melalui *intersep* α yang berbeda untuk setiap individu. Dampak dari setiap variabel independen dipertahankan sama untuk setiap individu sepanjang waktu observasi ($\alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \dots \neq \alpha_i$ dan $\beta_{1k} = \beta_{2k} = \beta_{3k} = \dots = \beta_{ik}$). Persamaan yang digunakan adalah:

$$\text{Tikem}_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{JP}_{i,t} + \beta_2 \text{IPM}_{i,t} + \beta_3 \text{PDRB}_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Struktur model ini mengasumsikan adanya perbedaan karakteristik tingkat kemiskinan (Tikem) di Provinsi Jawa Timur selama waktu observasi. Penggunaan kata *fixed* pada model FEM menunjukkan bahwa faktor penyebab heterogenitas

setiap individu di asumsikan tetap sepanjang waktu observasi. Pengaruh yang tetap dapat dilihat dari penggunaan nilai yang sama (yaitu 1) sepanjang waktu. Nilai 1 ditempatkan pada individu tertentu dan nol untuk individu lainnya. Konsep ini disebut sebagai variabel *dummy*. Secara umum struktur model dalam bentuk *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) adalah:

$$Tikem_{i,t} = \alpha_i + \alpha_2 D_2 + \alpha_3 D_3 + \alpha_4 D_4 + \alpha_5 D_5 + \beta_1 JP_{1i} + \beta_2 IPM_{2i} + \beta_3 PDRB_{3i} + e_{it}$$

C. Metode *Random Effect Model* (REM)

Pendekatan *random effect* mempertimbangkan setiap persamaan karakteristik individu. Penentuan α dan β didasarkan pada asumsi bahwa *intersep* α terdistribusi *random* antar unit μ_i . dengan kata lain, *slope* memiliki nilai yang tetap tetapi, *intercept* bervariasi untuk setiap individu. Sehingga persamaan untuk model ini adalah:

$$Tikem_{it} = \alpha_{1i} + \beta_{JP} JP_{it} + \beta_{IPM} IPM_{it} + \beta_{PDRB} PDRB_{it} + \mu_{it}$$

Dari model ini dapat dilihat bahwa *slope* β memiliki nilai tetap, tetapi *intersep* α_{1i} memiliki nilai yang bervariasi karena pengaruh *random* e_i terhadap *intersep* α_1 ($\alpha_{1i} = \alpha_1 + e_i$) yang bernilai tetap. Dengan model ini diasumsikan bahwa pengaruh dari setiap individu sama.

3.3 Pemilihan Model Data Panel

3.3.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih salah satu model terbaik pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan *Pooled Least Square Model* (PLS) dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : *Pooled Least Square model*

H_A : *fixed effect model*

H_0 ditolak jika p-value lebih kecil dari nilai α . Sebaliknya H_0 lebih besar dari nilai α , nilai yang digunakan sebesar 5% (0,05).

3.3.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan metode mana yang paling tepat antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut (Ekananda, 2015;405) :

$H_0 = 0$ (menggunakan *Random Effect Model/ REM*)

$H_A \neq 0$ (menggunakan *Fix Effect Model/FEM*)

Dasar penolakan H_0 adalah dengan menggunakan pertimbangan statistik Chi *Square* sebagaimana berikut:

1. $Chi_{statistik} < Chi_{tabel}$ maka hipotesis nol (H_0) diterima. Artinya, tidak terdapat hubungan antara efek individu dengan variabel bebas sehingga metode yang digunakan adalah *Random Effect*.
2. Jika $Chi_{statistik} > Chi_{tabel}$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan menerima hipotesis alternatif H_A . Artinya, efek individual berkorelasi dengan variabel bebas sehingga metode yang digunakan adalah *Fixed Effect*.

Menurut beberapa ahli ekonometrika yang telah membuktikan secara matematis dikatakan bahwa untuk memilih apakah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model* yang digunakan dapat dilakukan dengan melihat:

1. Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih besar dibandingkan dengan jumlah individu (N) maka disarankan menggunakan model efek tetap. $T > N$ maka digunakan model efek tetap.
2. Jika data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih kecil dibandingkan dengan jumlah individu (N) maka disarankan untuk menggunakan model efek random. $T < N$ maka digunakan model efek random (Nachrowi, 2006:318).

3.3.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Apabila dalam uji Hausman hasil model yang terbaik adalah *Random Effect*, maka dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Hal ini untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari metode OLS atau sebaliknya. Uji LM ini di dasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen.

Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = 0$ (menggunakan *Pooled Least Square/ PLS*)

$H_A \neq 0$ (menggunakan *Random Effect Model/ REM*)

Uji LM didasarkan pada distribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika $LM_{\text{statistik}}$ lebih besar dari nilai kritis statistik chi square maka kita menolak H_0 , yang berarti estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random effect daripada common effect. Sebaliknya jika $LM_{\text{statistik}}$ lebih kecil dari nilai kritis statistik chi square maka kita menerima H_0 , yang berarti estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode common effect daripada metode random effect.

3.4 Uji Statistik

Pengujian kelayakan model (Test of Goodness Fit) dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kelayakan suatu model yang dibuat dapat menerjemahkan data yang tersedia. Pengukuran yang digunakan untuk melakukan pengujian ini adalah:

3.4.1 Uji F-Statistik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji distribusi F dengan cara membandingkan antara nilai F_{tabel} dengan nilai F_{hitung} . Pengujian terhadap pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen dilakukan

melalui pengujian terhadap besarnya perubahan nilai variabel independen. Berikut ini penyusunan formula yang digunakan untuk penghitungan uji F secara simultan.

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1 - R^2) (n-k)}$$

dimana :

F = Pengujian secara bersama-sama (simultan)

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel

n = Banyaknya observasi

n-k = Derajat bebas penyebut

Perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. $H_0 : b_i = 0$ artinya secara bersama-sama variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi.
2. $H_A : b_i \neq 0$ artinya secara bersama-sama variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi.

Kriteria pengujian :

1. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika F-statistik > F-tabel atau nilai probabilitas F statistik \leq nilai probabilitas α maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Artinya secara bersama variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi.
2. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika F-statistik > F-tabel atau nilai probabilitas F statistik > nilai probabilitas α maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Artinya secara bersama variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi.

3.4.2 Uji t-statistik (uji pengaruh secara parsial)

Uji t-statistik pada fungsi regresi $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ bertujuan untuk membuat kesimpulan mengenai pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berikut ini penyusunan formula yang digunakan untuk penghitungan uji t secara parsial.

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)}$$

dimana:

t = Pengujian secara parsial

β_i = Koefisien regresi

$Se(\beta_i)$ = *Standard error* dari koefisien korelasi

Perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. $H_0 : b_i = 0$ artinya secara parsial variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi.
2. $H_A : b_i \neq 0$ artinya secara parsial variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi.

Kriteria pengujian :

1. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika t-statistik > t-tabel atau nilai probabilitas t statistik \leq nilai probabilitas α maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Artinya secara bersama variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi.
2. Dengan tingkat keyakinan (α) 5%, jika t-statistik > t-tabel atau nilai probabilitas t statistik > nilai probabilitas α maka H_0 ditolak dan H_A diterima. Artinya secara bersama variabel independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi.

3.4.3 Koefisien Determinasi (R-Square).

Koefisien regresi ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (uji parsial). Besarnya presentase pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi (R^2) persamaan regresi. Besarnya koefisien koefisien determinasi adalah 0 sampai 1 dengan rincian keterangan sebagai berikut:

1. Semakin mendekati nol, besarnya koefisien determinasi (R^2) suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen).
2. Semakin mendekati satu, semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (dengan kata lain semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen).

3.5 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Ada empat jenis uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

3.5.1 Uji Normalitas

Uji yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah nilai residual dari model yang dibentuk sudah normal atau tidak. Konsep pengujian uji normalitas menggunakan pendekatan *Jarque-berra test*. Pedoman J-B test adalah :

1. bila nilai JB hitung $>$ nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas J-B hitung \leq nilai probabilitas ($\alpha=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, error term adalah berdistribusi normal ditolak;

2. bila nilai JB hitung $<$ nilai X^2 tabel atau nilai probabilitas J-B hitung $>$ nilai probabilitas ($\alpha=5\%$), maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual, error term adalah terdistribusi normal.

3.5.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat adanya korelasi antara variabel bebas atau tidak, dimana regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel bebas (Wardhono, 2012:57-58). Jika dua atau lebih variabel independen dalam model regresi memiliki hubungan linear yang erat, maka model regresi ini tergejala oleh kondisi multikolinieritas. Jika tergejala multikolinieritas, maka model regresi menjadi buruk karena beberapa variabel akan menghasilkan parameter yang mirip sehingga dapat saling mengganggu.

Apabila nilai matrik korelasi melebihi 80% maka variabel-variabel bebasnya memiliki hubungan yang tinggi dan cenderung terkena multikolinieritas (Gujarati, 2015;409). Ada beberapa dampak terjadinya multikolinieritas, sebagai berikut :

1. Estimator masih bersifat *Blue* karena nilai varian dan kovarian besar;
2. Nilai hitung t-statistik variabel independen ada yang tidak signifikan karena interval estimasi cenderung lebih besar sehingga terdapat kesalahan pengujian hipotesis;
3. Nilai koefisien determinasi R^2 cenderung mempunyai nilai besar namun banyak variabel independen yang tidak signifikan.

3.5.3 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan yang lain yang disusun menurut runtut waktu. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan variabel yang saling terkait (Gujarati, 2015;354). Autokorelasi keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu

berkorelasi dengan variabel pada periode lain, dengan kata lain gangguan tidak random.

3.5.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel besar maupun kecil, walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya tidak bias dan bertambahnya sampel yang digunakan akan mendekati nilai sebenarnya (konsisten). Ini disebabkan oleh varians yang tidak minimum atau tidak efisien (Algifari, 2011:85).

Diagnosis adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam suatu regresi dapat dilakukan dengan melakukan pengujian korelasi ranking *Spearman*. Korelasi ranking *Spearman* dapat dihitung dengan formula:

$$r_s = 1 - 6 \left(\frac{\sum d_i^2}{N(N^2 - 1)} \right)$$

dimana :

d_i = Selisih ranking standar deviasi (S) dan ranking nilai mutlak *error* (ϵ)

N = Banyaknya sampel

Selain melakukan uji korelasi ranking *Spearman*, diagnosis terhadap kemungkinan adanya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi adalah dengan melakukan uji *Glesjer* (*Glesjer test*). Uji ini dilakukan dengan cara membuat model regresi yang melibatkan nilai absolut residual, sebagai variabel dependen, terhadap semua variabel independen. Jika semua variabel independen signifikan secara statistik, maka dalam model terdapat heteroskedastisitas (Algifari, 2011).

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari semua variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat terhindar kesalahpahaman permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tersebut (J.Supranto, 2001:322). Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. (Dalam satuan persen/tahun).
2. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. (Rupiah).
3. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di [Indonesia](#) setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. (Rupiah)

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka juga akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur
2. Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan maka akan mengurangi Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

5.2 Saran

Saran yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk lebih meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi salah satunya dengan kebijakan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya ketimpangan disetiap daerahnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan variabel bebas lainnya yang nantinya dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi seperti variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Adam Smith, *Teori Pertumbuhan Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi*. PT. Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Penerbit Graha Ilmu.
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama, BPFE. Yogyakarta.
- Azzahra, Annora. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011-2012*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Ekananda, Mahyus. 2016. *Analisis Ekonometrika Data Panel*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Halim, A. 2001. Analisis Deskriptif Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah. *Jurnal KOMPAK STIE Yogyakarta*, Yogyakarta.
- Indraningrum, Try. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). Semarang, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Kuncoro, Haryo. 2007. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makassar.
- Kurniawati dan Fransisca Rosiana. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. Surakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap

Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansidan Manajemen*, vol 5, No. 2, Desember 2010.

Permanasari, Windha Amiga. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2009-2011)*. Artikel Publikasi : Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pipit, Budiarti. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Struktur Belanja Daerah*. *Jurnal Akuntansi*. Volume XII No. 1. Universitas Brawijaya Malang.

Putri, Zuwesty Eka. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol. 5, No. 2.

Rahmawati, Nur Indah, 2010, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah, *Jurnal Akuntansi*, Volume 4, No 2, Universitas Diponegoro Semarang. Rutoto, Sabar, 2007, Pengantar Metodologi Penelitian. FKIP: Universitas Muria Kudus.

Yunisa, Raisya. 2015. *Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Skripsi Universitas Komputer Indonesia.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ketujuh Jilid 1. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia FE UII.

